

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Untuk mendapatkan mendapatkan model (*framework*) yang lengkap dari *maturity*, perlu untuk melihat dari sisi input, proses maupun output. Saat ini PeGI, sebagai *maturity framework* bagi e-Government di Indonesia, baru memandang dari sisi input. Oleh karena itu, agar PeGI menjadi panduan yang lebih lengkap bagi e-Government di Indonesia, maka perlu menambahkannya dari sisi proses dan output. Dalam penelitian ini, penulis mengembangkan *maturity framework* dari sisi proses.

Input yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah berupa teori-teori yang terkait yang dapat diadaptasikan. Untuk e-Government *maturity framework* lain yang ada di dunia, penulis hampir tidak menjadikannya sebagai sebuah input (referensi) dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan dari beberapa *framework* yang sudah diterapkan baik secara nasional maupun internasional, ataupun *framework* hasil penelitian yang ada, sangatlah kurang (bahkan hampir tidak sama sekali) memperhatikan sisi proses. Bahkan, sebagian besar umumnya memandang e-Government hanya sebagai sebuah website saja.

Hal yang tidak kalah pentingnya yang menjadi input dalam penelitian ini adalah kekhasan dari e-Government yang ada di Indonesia, yaitu seperti kebijakan, budaya dan lain-lain. Tujuannya adalah agar *framework* yang dibuat

dapat sesuai dengan e-Government di Indonesia, khususnya Pemprov dan Pemkab/Pemkot.

Input-input tersebutlah yang kemudian diolah sehingga menjadi sebuah *process maturity framework* untuk e-Government di Indonesia. Langkah-langkah yang dapat digunakan dalam mengolah (menganalisa dan merancang) input yang ada sehingga menjadi sebuah *process maturity framework*, adalah sebagai berikut:

- mengidentifikasi proses yang dapat dipicu dari input (indikator PeGI)
- menentukan indikator keberhasilan dari proses-proses tersebut.
- menentukan skala prioritas dari indikator-indikator, kemudian memetakannya pada empat tahapan perkembangan e-Government di Indonesia

Untuk tahapan perkembangan e-Government yang ada di Indonesia, penulis melakukan redefinisi ulang, dengan tujuan untuk memperluas definisi dari masing-masing tahapan. Hal ini penulis lakukan, dikarenakan tahapan perkembangan e-Government yang ada di Indonesia, hanya memandang dari sisi website saja.

Dari langkah-langkah tersebut, penulis menghadirkan sepuluh bentuk tahapan kematangan, yang berasal enam dimensi PeGI. Berikut ini merupakan pengelompokan dari tahapan kematangan tersebut, yaitu:

- Visi Misi TIK, Strategi Perencanaan TIK, Skala Prioritas Implementasi, Anggaran dan Audit
- Peraturan dan Ketetapan Instansi
- Tupoksi dan SOP
- SDM dan Pengembangan SDM
- Keamanan TIK

- *Disaster Recovery*
- Peralatan TIK dan Pemeliharaannya
- Situs Web
- Aplikasi *Front Office*
- Aplikasi *Back Office*
- Perencanaan

6.2 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian ini, penulis mengakui terdapat beberapa kekurangan, yaitu:

- minimnya literatur yang memberikan informasi kekhasan dari e-Government di Indonesia, menyebabkan penelitian ini kurang menampilkan keunikan dari e-Government di Indonesia
- analisis dari proses dan indikator keberhasilan hanya dilakukan penulis per dimensi, padahal dimungkinkan untuk mendapatkan proses dan indikator dari perpaduan berbagai indikator dengan dimensi yang berbeda.
- tidak ada proses yang terkait dengan pengelolaan proyek TIK yang diidentifikasi dan dianalisis lebih dalam oleh penulis dalam penelitian ini

Penelitian ini dan yang terkait dengan penelitian ini sangat banyak peluang untuk dikembangkan. Pada penelitian ini, penulis tidak mengidentifikasi adanya dimensi lain diluar dari yang sudah ada di PeGI, padahal mungkin saja ada dimensi lain yang belum tercantum dalam PeGI. Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan faktor unik dari e-Government di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menyarankan bagi penelitian yang sejenis, untuk dilakukan wawancara ke beberapa instansi Pemerintah Daerah ataupun pengamat dan regulator dari e-Government sehingga

mendapatkan karakteristik dari e-Government di Indonesia. Menurut penulis, hal ini cukup baik untuk dikaji lebih lanjut, karena akan sangat berguna bagi penelitian lain yang sejenis pada masa yang akan datang.

